

## IMPLEMENTASI DASAR KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Irfan Sazali Nasution<sup>1</sup>, Nur Handayani<sup>2</sup>, Nurazizah Dawamah<sup>3</sup>, Novia Syalsa Dila Seja T<sup>4</sup>, Shaiecka Radya Ruslan<sup>5</sup>, Shafira Putri Cantika<sup>6</sup>

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

\*Corresponding Author: irfan1100000177@uinsu.ac.id

### ABSTRAK

Kesehatan berperan penting dalam pembangunan nasional karena memengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. JKN bertujuan menciptakan sistem jaminan kesehatan yang adil, merata, dan inklusif. Penelitian ini menganalisis faktor keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dasar JKN. Metode yang digunakan adalah menggunakan Google Scholar untuk melakukan tinjauan pustaka menyeluruh terhadap artikel ilmiah terpilih yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir, menggunakan kata kunci relevan dan kriteria ketat untuk inklusi dan eksklusi. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan JKN oleh BPJS Kesehatan masih menghadapi masalah besar. Beberapa masalah tersebut termasuk kesadaran masyarakat yang rendah, pemahaman yang terbatas tentang kebijakan, dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam hal sistem rujukan berjenjang. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan ketersediaan dana. Pembicaraan mendalam tentang model implementasi kebijakan Hogwood dan Gunn menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan, kejelasan tugas, dan dukungan kelembagaan. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan pemahaman publik, peningkatan efisiensi sosialisasi, peningkatan sistem pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan dan sumber daya adalah semua faktor yang menentukan keberhasilan JKN. Agar JKN benar-benar menjadi sistem perlindungan sosial yang adil, responsif, dan berkelanjutan yang membantu meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia, diperlukan komitmen berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat.

**Kata Kunci** : Implementasi, Jaminan Kesehatan Nasional, Kebijakan Kesehatan

### ABSTRACT

*Health plays a vital role in national development because it impacts productivity and quality of life of the community. Indonesia's National Health Insurance (JKN) policy aims to create a fair, equitable, and inclusive health insurance system. By prioritizing the factors that determine success, policy gaps, and problems in the field, this study aims to analyze the implementation of the JKN basic policy. The method employed involved a comprehensive literature review through Google Scholar to conduct a comprehensive literature review of selected scientific articles published in the last five years, using relevant keywords and strict criteria for inclusion and exclusion. The results show that the implementation of JKN by BPJS Kesehatan still faces major problems. Some of these problems include low public awareness, limited understanding of the policy, and inconsistencies in the implementation of standard operating procedures (SOPs), especially in terms of the tiered referral system. The success of this program is greatly influenced by the quality of human resources, the availability of health facilities, and the availability of funds. An in-depth discussion of the Hogwood and Gunn policy implementation model shows the importance of coordination between stakeholders, clarity of tasks, and institutional support. This study found that increasing public understanding, increasing the efficiency of socialization, improving the monitoring system, and improving the quality of services and resources are all factors that determine the success of JKN. In order for JKN to truly become a fair, responsive and sustainable social protection system that helps improve the welfare and health of the Indonesian people, ongoing commitment from the government and society is needed.*

**Keywords** : Implementation, National Health Insurance, Health Policy

## PENDAHULUAN

Kesehatan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dapat berdampak positif pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara keseluruhan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta dapat memperoleh pelayanan kesehatan," dan ayat (3) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat".

"Badan Penyelenggara Nomor Jaminan Sosial harus dibentuk dengan Undang-Undang," menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Negara harus menjaga hak asasi manusia (HAM), termasuk hak atas kesehatan. "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak," kata ayat ketiga Pasal 34 Konstitusi 1945. "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" adalah sila kelima Pancasila, yang diterapkan dalam artikel ini. Selain itu, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.". Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas standar kesehatan fisik dan mental terbaik (Nim, 2017).

Kesehatan Nasional (JKN), yang memberikan asuransi kepada rakyat Indonesia. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang di Indonesia memiliki akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Pembangunan kesehatan, dianggap sebagai komponen penting dari pertumbuhan nasional, bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan terbaik melalui peningkatan pengetahuan, keinginan, dan kemampuan untuk menjalani gaya hidup sehat. Saat ini, kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan dianggap sebagai masalah kemiskinan. Pengembangan di bidang kesehatan dapat meningkatkan kualitas manusia dan meningkatkan daya saing. Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang diluncurkan sebagai bagian dari Program Jaminan Kesehatan Nasional, telah membantu masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses. Program Jaminan Kesehatan Nasional didasarkan pada beberapa undang-undang utama, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Karena prinsip saling menguntungkan yang ada di masyarakat yang sehat, partisipasi masyarakat dalam JKN-KIS sangat penting. Masyarakat yang sehat dapat membantu mengurangi biaya kesehatan per orang. Kesehatan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada kesadaran peserta yang sehat dan dukungan generasi muda terhadap orang tua (Alayda et al., 2024).

Kesehatan masyarakat adalah pilar utama pembangunan suatu negara karena kesehatan yang baik berdampak langsung pada produktivitas individu dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesehatan masyarakat dalam konteks pembangunan tidak hanya mencakup pengobatan dan perawatan medis, tetapi juga mencakup promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi. Kebijakan yang mendukung program kesehatan masyarakat diperlukan karena populasi yang sehat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kesehatan masyarakat menangani permasalahan seperti

penyakit menular dan tidak menular, gizi buruk, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. (Hamidah et al., n.d.)

Kebijakan Nasional (JKN), yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Program, dijalankan oleh pemerintah Indonesia, menurut Peraturan Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk mengelola program jaminan kesehatan, undang-undang ini mengharuskan pembentukan badan hukum. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Penyelenggara Pelayanan Kesehatan (PPK), dan masyarakat adalah tiga komponen penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pada 1 Januari 2014, BPJS resmi dibentuk sebagai badan hukum publik untuk mengelola program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Tujuan Nasional dari penyelenggaraan JKN bertujuan untuk memastikan bahwa peserta memperoleh manfaat kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mulai 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki akses ke jaminan kesejahteraan sosial (JKN) (Yuditia et al., 2021).

Dengan menggunakan BPJS Kesehatan, pemerintah berusaha untuk memberikan jaminan kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasar hidup peserta dan keluarganya. Namun, sektor kesehatan yang seharusnya sosial kini menjadi komersil, membuat fasilitas kesehatan menjadi barang mewah yang sulit dijangkau. Masih ada banyak keluhan tentang pelayanan kesehatan, seperti biaya tinggi dan pelayanan rumah sakit.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan-kebijakan kesehatan yang menjadi fondasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia diimplementasikan di lapangan. Fokus utama adalah pada prinsip-prinsip dasar yang seharusnya menjadi panduan dalam penyelenggaraan JKN, seperti pemerataan akses terhadap layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, keadilan dalam distribusi manfaat dan beban, serta efisiensi dalam pengelolaan sumber daya kesehatan.

Melalui pendekatan ini, penelitian akan berusaha untuk mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan kebijakan yang ditetapkan dan realitas implementasi. Ini termasuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi, mulai dari aspek regulasi, kapasitas kelembagaan, partisipasi pemangku kepentingan, hingga perilaku penyedia layanan dan peserta JKN.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan kesehatan dalam kerangka JKN, serta kontribusi substantif dalam bentuk rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi untuk terus menyempurnakan Sistem JKN agar lebih responsif, adil, dan berkelanjutan dalam menjamin kesehatan masyarakat Indonesia.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka (literature review) yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai penelitian yang berbentuk artikel ilmiah yang valid dan komprehensif mengenai Implementasi Dasar Kebijakan Kesehatan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Proses pengumpulan sumber artikel dilakukan dengan cermat, di mana peneliti melakukan pencarian berbasis data menggunakan platform Google Scholar, yang merupakan salah satu sumber terpercaya untuk menemukan literatur akademik.

Dalam melakukan pencarian, peneliti menerapkan strategi yang sistematis dengan menggunakan beberapa kata kunci yang relevan, antara lain: "implementasi", "jaminan kesehatan nasional", dan "kebijakan kesehatan". Kata kunci ini dipilih untuk memastikan bahwa artikel yang ditemukan benar-benar berkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia melalui kebijakan kesehatan yang efektif.

Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini mencakup artikel-artikel yang secara khusus membahas upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Indonesia serta implementasi kebijakan kesehatan yang efektif. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satu kebijakan utama pemerintah Indonesia, bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan yang lebih baik dan merata.

Sebaliknya, artikel yang tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan dari pertimbangan karena tidak memenuhi kriteria berikut: tidak lengkap, ditulis dalam Bahasa Indonesia, diterbitkan lebih dari lima tahun yang lalu, dan tidak memenuhi kriteria lainnya. Setelah melalui proses penyaringan yang ketat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, peneliti berhasil menemukan dan memilih artikel untuk penelitian ini. Diharapkan bahwa artikel-artikel ini akan memberikan pemahaman yang mendalam dan analisis yang berharga tentang implementasi kebijakan kesehatan dalam konteks JKN di Indonesia.

## HASIL

Hasil penelitian yang dimasukkan dalam kajian literatur ini adalah analisis dan rangkuman dari artikel yang didokumentasi terkait dengan Implementasi Dasar Kebijakan Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

**Tabel 1 Hasil Penelitian Literature**

Penulis dan Tahun		Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Lilis (2025)	Hamidah	Implementasi Kebijakan Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional	Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang dirancang untuk memastikan seluruh warga negara memperoleh layanan kesehatan yang layak. Melalui program ini, masyarakat diharapkan dapat menikmati fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dan berkualitas. Salah satu aspek utama dari JKN adalah pemberian layanan medis kepada pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan secara menyeluruh.
Mariam (2014)		Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi	Memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perawatan medis adalah tujuan utama dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini bertujuan untuk memfasilitasi akses ke layanan kesehatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Perlindungan ini berlaku untuk semua peserta, baik yang membayar iuran secara mandiri maupun yang ditanggung oleh pemerintah. Akibatnya, JKN berusaha memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh manfaat pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau, sehingga kesehatan masyarakat secara keseluruhan dapat dijaga dan ditingkatkan.

Triayu Nur Afifah (2022)	Studi Literatur: Analisis Implementasi Kebijakan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia	Studi ini menemukan bahwa implementasi program BPJS Kesehatan di Indonesia telah memiliki efek positif pada banyak fasilitas layanan kesehatan. Namun, secara keseluruhan, masih ada banyak masalah yang dihadapi, terutama di beberapa institusi kesehatan. Keterbatasan tenaga kerja kesehatan yang kompeten dan profesional merupakan salah satu kendala utama yang ditemukan. Faktor penghambat lain adalah kesulitan komunikasi internal antara struktur organisasi rumah sakit dan puskesmas dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Karena keadaan ini, implementasi BPJS Kesehatan di seluruh unit layanan kesehatan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja, diperlukan tindakan strategis, seperti meningkatkan sistem komunikasi internal dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program BPJS Kesehatan di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Indonesia, agar tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat tercapai secara merata.
Resa Listianti (2022)	Analisis Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara umum telah dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses manfaat dari program tersebut secara merata. Penelitian ini menyoroti adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat JKN, di mana tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang dijanjikan. Selain itu, terdapat kendala terkait kurangnya pemahaman dan informasi yang memadai mengenai prosedur dan mekanisme pengobatan dalam program JKN, yang menyebabkan sebagian peserta mengalami kebingungan dan hambatan dalam memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya upaya peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan program JKN dengan lebih baik dan merata.

Dalam tinjauan literature review ini peneliti mengenai Implementasi Dasar Kebijakan Kesehatan Dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Artikel yang didapatkan sesuai dengan kriteria berjumlah tujuh artikel tahun 2014 sampai dengan tahun 2025. Artikel pertama membahas hasil Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak, Artikel kedua menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah untuk menjamin bahwa setiap orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang layak, Artikel ketiga, pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Indonesia telah menghasilkan hasil yang baik di beberapa fasilitas layanan kesehatan, tetapi secara keseluruhan, masih ada banyak masalah yang dihadapi, terutama di beberapa institusi kesehatan, Artikel keempat menunjukkan bahwa penelitian ini menekankan bahwa ada ketimpangan dalam pembagian manfaat JKN, yang menyebabkan tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan yang dijanjikan.



## PEMBAHASAN

Studi ini memberikan penjelasan tentang bagaimana kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memengaruhi kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan. Berdasarkan enam jurnal yang telah dievaluasi, terlihat bahwa pemerintah daerah telah memprioritaskan masalah kualitas dan akses layanan kesehatan. Pemerintah daerah telah membuat kebijakan khusus untuk menangani masalah ini.

Karya (Lilis Hamidah, 2025) berjudul Salah satu jurnal yang diperiksa adalah Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Jurnal ini menjelaskan Program JKN sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Program ini diharapkan memberi masyarakat akses yang mudah ke layanan kesehatan berkualitas. Pemberian layanan medis kepada pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah komponen penting dalam pelaksanaan program ini karena KIS merupakan sarana utama untuk memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat. Jurnal ini menemukan bahwa kebijakan JKN telah membantu masyarakat mendapatkan lebih banyak layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan dan tidak mampu. Namun demikian, seperti yang dilaporkan oleh jurnal lain, banyak tantangan di lapangan masih menghalangi pelaksanaan kebijakan ini. Diperlukan tindakan yang lebih strategis untuk meningkatkan efektivitas program; ini termasuk meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat program, dan meningkatkan fasilitas pendukung di fasilitas kesehatan. Lilis Hamidah, tahun 2025 Penelitian ini menyoroti betapa pentingnya tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat sebagai faktor eksternal yang sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini penting karena semua warga negara harus mendaftar untuk mendapatkan layanan JKN sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Lilis Hamidah et al., 2025).

Sebaliknya, penelitian (Mariam, 2019) menemukan bahwa penerapan kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa program tersebut berusaha untuk memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik yang membayar iuran secara mandiri maupun yang mendapat subsidi dari pemerintah, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa layanan kesehatan yang layak dan terjangkau tersedia untuk semua orang. Melalui penyediaan akses yang merata terhadap fasilitas kesehatan, program ini mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Mariam juga mengatakan bahwa JKN masih menghadapi banyak tantangan dalam memberikan perlindungan kesehatan menyeluruh. Di antaranya adalah kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan di tingkat pelaksana serta masih adanya kendala dalam menjangkau secara optimal seluruh kelompok masyarakat. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana program dijalankan, seberapa banyak sumber daya yang tersedia, dan bagaimana pemerintah dan lembaga pelayanan kesehatan bekerja sama dengan baik. Salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan adalah ketersediaan fasilitas kesehatan dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya sesuai standar. Akibatnya, infrastruktur yang memadai, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang Program JKN harus terus ditingkatkan. Selain itu, masyarakat kurang memahami hak dan mekanisme JKN, yang memperlambat pencapaian tujuan utama program ini, yaitu menjamin kesehatan masyarakat secara keseluruhan (Mariam 2019).

Sebaliknya, penelitian oleh Triayu Nur Afifah (2022) menemukan bahwa penerapan program BPJS Kesehatan di beberapa fasilitas layanan kesehatan menunjukkan hasil yang baik. Namun, secara keseluruhan, masih ada beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan program ini secara efektif di berbagai institusi kesehatan. Salah satu hambatan utama yang mempengaruhi kualitas layanan kesehatan adalah keterbatasan tenaga kerja yang kompeten dan profesional. Faktor penghambat tambahan adalah masalah komunikasi internal antara struktur organisasi rumah sakit dan puskesmas dan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Karena keadaan saat ini menyebabkan pelaksanaan program BPJS Kesehatan belum optimal di seluruh unit pelayanan kesehatan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja program. Langkah-langkah ini termasuk meningkatkan komunikasi internal dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan di Indonesia. Tujuan utama program, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara merata, diharapkan dapat dicapai melalui upaya ini. (Triayu Nur Afifah et al., 2022)

Studi tambahan oleh Resa Listianti (2022) menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara umum berhasil dan mencapai tujuan. Namun, program tidak dapat diterapkan secara merata pada beberapa kelompok masyarakat. Studi ini menekankan bahwa ada ketimpangan dalam pembagian manfaat JKN, yang berarti sebagian besar masyarakat tidak memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan yang dijanjikan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa beberapa hambatan termasuk pemahaman yang buruk tentang prosedur dan mekanisme pengobatan yang ada dalam program JKN, yang menyebabkan kebingungan dan kesulitan bagi sebagian peserta untuk memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal. Akibatnya, penelitian ini menekankan bahwa masyarakat harus lebih disosialisasikan dan dididik agar mereka dapat memanfaatkan Program JKN dengan lebih baik dan merata. Resa Listiani dan rekan, 2022.

## KESIMPULAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa semua orang di Indonesia memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan melalui sistem asuransi sosial wajib. Dengan menggunakan prinsip gotong royong dan ekuitas, program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, mulai dari promotif, preventif, kuratif, hingga rehabilitatif. Tujuan program ini adalah untuk memastikan bahwa semua peserta menerima layanan medis sesuai kebutuhan mereka tanpa memandang kemampuan mereka untuk membayar iuran.

Keterbatasan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis yang tidak merata, kebutuhan pembiayaan yang tinggi, dan tantangan administratif dan teknis adalah beberapa hambatan yang masih timbul dalam pelaksanaan program JKN, meskipun program tersebut telah mencapai tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan, peningkatan layanan, dan evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah dan seluruh pihak terkait, JKN diharapkan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menyediakan perlindungan sosial kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulan yang jelas dan menyeluruh serta mengandung kontribusi teoretis yang signifikan lebih penting daripada pernyataan umum yang tidak terarah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Bapak Irfan Sazali Nasution, S.Ked, M.Kes, atas saran dan dukungan yang beliau berikan selama proses penyusunan jurnal ini. Penulis banyak belajar tentang ketelitian berpikir, ketegasan dalam menyusun argumen, dan pentingnya mempertahankan relevansi kajian terhadap konteks yang sedang berubah dari setiap percakapan dan saran yang dia berikan. Kehadiran beliau sebagai pembimbing telah memainkan peran penting dalam proses pengembangan gagasan dan penyusunan tulisan ini hingga selesai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Tawai, dkk (2023). Model Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 5. No. 1. (2023), hlm 275-284.
- Afifah, T. A., Yusrani, K. G., Shabrina, R. S. N., Istanti, N. D. (2022). Studi Literatur: Analisis Implementasi Kebijakan Program BPJS Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Indonesia*, 2(3), 115-119.
- Agustin, E. N., Madani, J. F., Azzahra, K. A., & Istanti, N. D. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Upaya Meningkatkan Akses Kesehatan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Anestesi*, 1(3), 34-45.
- Alayda, N.F., Aulia, C.M., Ritonga, E.R., Purba, S.H., (2024). Literature Review : Analisis Dampak Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) Terhadap Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Literature Review : Analyzing The Impact Of The National Health Insurance ( JKN ) Policy On Access and Quality Of Health Services 7, 2616–2626.
- Amieratunnisa, A., & Indarjo, S. (2018). Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 2(1), 69–79.
- Andani, A. T. V., Setyowati, E., & Amin, F. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2019.005.03.9>
- Anjayani, D. (2021). Analisis Kebijakan dan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional*, 1(2), 81-94.
- Azeri, B., Tamba, W. P., & Silaban, R. A. (2025). Realisasi Progresif Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 135-152.
- Gurusinga, M. O., & Sujianto. (2023). Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pengemudi Ojek Online Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Cross-Border*, 6(1), 305–314.
- Hamidah, L., Magister, P., Administrasi, I., Nasional, J.K., n.d. Implementasi kebijakan tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional.
- Huraerah, A. (2022). Kebijakan perlindungan sosial: Teori dan aplikasi Dynamic Governance. *Nuansa Cendekia*.
- Iva, M.I.N., (2015). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kota Makassar. *Jakpp* 1, 149–



156.

- Juniati, Z. (2022). Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Aceh Timur. *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*, 8(2), 79-89.
- Listiani, R., Pebriyanti, A., Fawwaz, M., & Istanti, N. D. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional: a Systematic Review. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(4), 645652. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/9248>
- Malik, A. A. (2019). Implementasi kebijakan diskresi pada pelayanan kesehatan badan penyelenggara jaminan kesehatan (bpjs). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 8(1), 1-8.
- Mariam, (2014). Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. implementasi Kebijak. jaminan Kesehat. Nas. pada dinas Kesehat. kabupaten sigi 4, 37–46.
- Nim, E., (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL Oleh : Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kajian Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan ( JKN ) SOCIAL SECURITY HEALTH CARE ( BPJS ) IN TIMPUK VILLAGE untuk memberikan kepastian perlindungan Ketenagakjaan menyelenggarakan Jaminan Undang- Sistem Jaminan Sosial Nasional ( SJSN ) dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial “ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial JKN BPJS Kesehatan sebagai berikut ; 6, 1–13.
- Nadia, N., Hadiwiardjo, Y. H., & Nugrohowati, N. (2023). Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional terhadap Pelaksanaan Pelayanan Promotif dan Preventif. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 12(05), 388-401.
- Nuurjannah, N. Y. (2021). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13(2), 63-77.
- Rizky, R. N., & Mahardika, A. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Rumah Sakit Umum Kota Medan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4).
- Tawai, A., Afriadi, Z., & Yusuf, M. (2023). Model Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinas Kesehatan Kota Kendari. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5 (1), 275-284.
- Yuditia, A., Hidayat, Y., Achmad, S., 2021. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Bpjs Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *J. Magister Ilmu Huk.* 6, 43.